



IPB Today

Volume 166 Tahun 2019

IPB Gandeng Oxford dan Queensland Gelar Seminar dan Lokakarya Pangan



Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor IPB (SV IPB) bekerjasama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan "Interdisciplinary Food System Training and Learning" (IFSTAL) Program (Oxford University) dan University of Queensland Australia menyelenggarakan kegiatan seminar-lokakarya "Food System Dynamics" di IPB International Convention Centre, Kamis (21/2). Kegiatan ini diikuti oleh para senior agroekonom dari berbagai instansi diantaranya: IPB, PERHEPI, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Universitas Padjadjaran, UNS, Polbangtan Bogor, Universitas Jember, PSEKP, Dinas Pertanian Kota Bogor dan Universitas Sahid Jakarta.

Acara dibuka Dekan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Ir. Arief Daryanto, DipAgEc, MEc diikuti dengan kata sambutan oleh Ketua Umum PERHEPI Prof. D. Ir. Hermanto Siregar, MEc. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Dr. John Ingram selaku koordinator Program IFSTAL dari Oxford University

dan Prof. Bill Bellotti dari Queensland University. Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi oleh kedua pembicara mengenai "Global Food System", "Nutrition Challenges", "Key Issues in Food System", "Food System Thinking", "Policy Intervention in the Food System".

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengubah paradigma pendekatan sektoral menjadi pendekatan sistem pangan global. Tujuan lain adalah agar para peserta menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing bagaimana merumuskan model dan implementasi food system yang baru yang efisien, inklusif, berdaya tahan terhadap perubahan iklim (climate-resilient), inklusif, terkait dengan gizi dan kesehatan, layak secara bisnis dan berkelanjutan.

"Ketahanan pangan di Indonesia terus membaik, tetapi sektor pangan kita saat ini masih bersifat fragmented, broken links antar sub sistem dan masih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan sistem pangan membantu mengatur pemikiran kita tentang bagaimana berbagai aktor (pelaku) sistem pangan dapat bersatu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi," ujar Dr. Arief Daryanto.

(AD/ris)

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti **Pimpinan Redaksi:** Siti Nuryati **Redaktur Pelaksana:** Aris Solikhah
Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP **Reporter :** Dedeh H, Awaluddin **Fotografer:** Cecep AW, Bambang A
Layout : Dimas R **Alamat Redaksi:** Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga
Telp. : (0251) 8425635, **Email:** humas@apps.ipb.ac.id



@ipbofficial



@ipbofficial



@institutpertanianbogor



LINE@ @ipb.ac.id



www.ipb.ac.id

Saatnya Terapkan Sistem Cold Chain untuk Daging Berkualitas



Produk hewan merupakan salah satu sumber pangan yang kaya akan protein yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang sehat dan cerdas. "Namun demikian, produk pangan asal hewan merupakan salah satu produk yang dikategorikan sebagai produk yang mudah rusak dan berpotensi membawa bahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu harus diperhatikan penanganan kesehatan daging mulai dari hulu sampai ke hilir melalui rantai suplai yang cukup panjang dengan baik, sehat dan berkualitas," kata Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Rudy Afnan.

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI) dan Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) mengadakan pelatihan dengan tema "Logistik Rantai Dingin pada Daging dan Kunjungan ke Cold Storage", Kamis-Jum'at (21-22/2) di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Lebih lanjut Dr. Rudy menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi dalam penanganan daging beku yang sehat dan berkualitas, sehingga diperlukan pelatihan atau sosialisasi tentang cara dan langkah penerapan rantai dingin pada daging beku serta prospek usahanya bagi para pemangku kepentingan yang berminat. Maka produk pangan asal hewan selain harus dipikirkan ketersediaannya, juga harus ditangani dengan baik untuk dapat menjadi bermanfaat dan terjamin sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Dr. Rudy menambahkan, kemampuan pengelolaan cold chain diperlukan untuk menghindari kerugian yang tinggi akibat kerusakan produk hasil ternak, serta untuk mempertahankan mutu produk yang semakin menjadi tuntutan dalam era globalisasi. "Salah satu sarana penyimpanan yang harus tersedia untuk menjaga mutu komoditas perishable adalah cold storage. Sistem cold chain ini juga mampu menjaga supply daging sepanjang tahun ketika angka produksi relatif stabil dan dapat

diprediksi. Jika produksi berlebih, surplusnya dapat disimpan beku dan dikeluarkan saat permintaan meningkat," kata Dr. Rudy.

Harapannya dengan pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan cold chain atau rantai daging pada produk daging sehingga menghasilkan daging beku yang sehat dan berkualitas bagi kepentingan konsumen.

Sementara narasumber dari Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP) Fapet IPB, Prof. Dr. Irma Isnafia Arief menjelaskan mengenai supply chain produk daging sapi. Daging bukan hanya komoditas pertanian yang punya nilai ekonomi, melainkan juga esensial bagi pemenuhan kebutuhan gizi rakyat Indonesia, terutama generasi muda bangsa. Namun, kepedulian konsumen akan kesehatan daging masih belum terbangun dengan baik dan benar. Daging sehat adalah daging yang berasal dari pola budidaya ternak yang sehat, tidak mencemari lingkungan, dan disembelih secara manusiawi.

Menurutnya, daging sapi merupakan salah satu produk pangan yang memiliki nilai gizi kebutuhan konsumsi produk hewan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat, sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah dan pelaku usaha untuk dapat menjamin ketersediaan pasokan dan distribusi produk secara nasional. Daging sapi adalah produk peternakan yang memiliki nilai ekonomis.

"Dalam rantai pasokan atau supply chain di Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Kabupaten Bogor ketika sapi siap untuk di potong atau disembelih, daging sapi tersebut akan terjual habis sekira 80 persen dibeli oleh pedagang baso, hanya 20 persen daging sapi yang dibeli ibu rumah tangga dan rumah makan Padang," ujar Prof. Irma.

Prof. Irma menambahkan, implikasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok daging dapat dilakukan melalui usaha yang terintegrasi secara horizontal, meningkatkan kinerja penerapan manajemen rantai pasok daging dengan melibatkan usaha skala kecil dan menengah/besar, dan meningkatkan integrasi vertikal secara parsial ke arah lebih holistik.

Prof. Irma menegaskan, untuk itu koordinasi dan keterhubungan antar bagian dalam keseluruhan rantai

pasok produk daging perlu mendapat perhatian serius dalam rangka meningkatkan keterpaduan proses produksi dan keterpaduan antar pelaku usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing produk daging sapi lokal. Berdasarkan pertimbangan itu diperlukan informasi terkait dengan kinerja rantai pasok peternakan dan daging sapi.

"Kami berharap ada harmonisasi kesepahaman pada semua stakeholder baik pemerintah maupun swasta terkait motivasi keamanan dan stabilitas, konsumen terkait harga dan kemudahan akses/ketersediaan, dan pelaku usaha ternak dan unggas terkait kepastian usaha, sehingga strategi pendekatan dengan melibatkan semua sektor dapat lebih efektif mendukung upaya tersebut," pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber yaitu dari Dosen Universitas Trisakti, Raden Didiet Rachmat Hidayat, PT Sierad Produce, Tbk, Sudarno dan PT. Adib Cold Logistik Indonesia, Irene Natasha. **(Awl/ris)**



Industri Pangan, Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi



Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) bekerja sama dengan Indonesia Food and Innovation Center (IFIC) dan Nielsen Indonesia, Jumat (15/2) di Gedung Menara KADIN telah melaksanakan seminar dengan tema “Percepatan Industri Pangan Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi road map yang akan diberikan kepada pemerintah (presiden dan kementerian terkait) untuk menjadi masukan.

Dalam kesempatan ini Dr. Arief Daryanto, Dekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Adjunct Professor University of New England Australia diundang sebagai salah satu narasumber dalam seminar tersebut. Dr. Arief Daryanto menyampaikan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pangan para pelaku industri dan penentu kebijakan perlu memahami konsep dan implementasi pendekatan sistem pangan atau food system approach yang berkelanjutan.

Dr. Arief Daryanto menjelaskan pentingnya cara berpikir mengenai dinamika produksi dan konsumsi makanan dan minuman sebagai bagian dari sistem pangan yang lebih besar dan pentingnya pendekatan terpadu dalam menganalisis struktur, perilaku dan kinerja sistem pangan nasional. “Industri pangan merupakan kegiatan yang menambah nilai atau value addition activities yang kompleks sifatnya, tidak hanya berfokus pada satu aspek atau masalah saja, tetapi juga pada bagaimana semua

elemen dari suatu sistem bersatu dan berinteraksi satu sama lain,” jelas Dr. Arief Daryanto.

Lebih lanjut Dr. Arief Daryanto mengatakan bahwa makanan yang tersaji di piring kita adalah produk dari berbagai tindakan, hubungan dan proses yang membentuk sistem pangan. Sistem pangan tidak hanya perlu menjaga availability (ketersediaan) tetapi juga accessibility (keterjangkauan), kualitas dan keamanan pangan.

“Sistem pangan di Indonesia saat ini masih bersifat fragmented, broken links antar sub sistem dan masih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan sistem pangan membantu mengatur pemikiran kita tentang bagaimana berbagai aktor atau pelaku sistem pangan dapat bersatu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi. Tantangan utama kita ke depan adalah bagaimana memproduksi pangan dengan lebih banyak, lebih berkualitas, lebih terjangkau dan lebih berkelanjutan dengan menggunakan input yang lebih sedikit (grow more, better, more sustainable, more affordable food with less inputs);” paparnya.

Narasumber lain dalam seminar tersebut adalah Prof. Drajad Irianto, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membahas mengenai Industri 4.0, Prof. Purwiyatno Hariyadi, Guru Besar IPB yang membahas mengenai ketahanan pangan dan Agus Nurudin, Managing Director Nielsen Indonesia yang membahas mengenai ritel dan distribusi dalam industri pangan. **(AD/ris)**



IPB Dampingi Petani Salut NTB Bangkit dari Musibah Gempa



Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu wilayah paling parah terkena dampak gempa, sehingga sampai kini masih memerlukan pendampingan untuk proses recovery. Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) terketuk untuk meringankan penderitaan korban, dengan terjun langsung melakukan program pendampingan ke Petani Desa Salut. Desa yang merupakan Pusat Gempa Lombok tujuh Skala Richter ini termasuk 21 desa yang terisolir kala itu.

Desa yang tingkat kerusakan mencapai di atas 90 persen ini didiami Suku Asli Pulau Lombok atau Suku Sasak dan sangat kental budaya gotong royongnya. Bermodal jiwa dan semangat gotong royong tinggi, desa ini dengan cepat melakukan rehabilitasi beberapa fasilitas umum dan sosial termasuk mental. Lebih dari tiga bulan setelah kejadian hingga saat ini kegiatan perekonomian sudah kembali berjalan normal dan masyarakat mulai kembali berkebun dan memulai aktivitas ekonomi dengan melakukan transaksi jual beli dari kebun.

Dalam kesempatan ini HA IPB melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NTB HA IPB Mataram untuk memperlancar kegiatan. Dalam aksinya HA IPB yang selalu berkoordinasi dengan Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSB LPPM) IPB memanfaatkan momentum untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk menggerakkan kader desa dalam program pendampingan. Program ini juga didukung tim relawan lokal dari masyarakat desa untuk bersama mempersiapkan lahan yang akan digunakan. Tahap awal lahan seluas satu hektar yang merupakan milik salah satu

tokoh dikenal "Pakcik" masyarakat dari Dusun Salut Timur digarap sebagai percontohan, sebelum ditularkan ke yang lain.

Masyarakat desa sangat antusias menyambut dan terlibat dalam program ini. Hal ini terlihat dari jumlah partisipasi masyarakat saat sosialisasi, mengolah lahan hingga saat turun gotong royong dalam penyiapan lahan. Modal gotong royong menjadi modal untuk bekerja menyiapkan kebun tanaman obat ini, karena masyarakat sadar bahwa kesehatan sangat penting. Hal ini juga karena kondisi geografis yang jauh dari pusat kesehatan, jumlah obat generik terbatas, tenaga kesehatan dan peralatan pengobatan yang sangat minim dibanding jumlah masyarakat yang sakit.

Desa ini hanya mempunyai satu puskesmas pembantu dengan satu tenaga kesehatan. Jarak antara desa ke Puskesmas Kecamatan mencapai 17 kilometer, sedang ke rumah sakit kabupaten berjarak 33 kilometer dan rumah sakit provinsi harus ditempuh sejauh 72 kilometer. Akses kesehatan yang lumayan jauh juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk selalu hidup sehat dan menjaga kesehatan.

Saat ini sedang dipersiapkan program penanaman tanaman obat keluarga yang meliputi : temulawak, jahe, kunyit, lengkuas dan sereh. Sedangkan untuk tanaman gizi meliputi : kangkung, bayam, sawi, slada, terong, tidak ketinggalan tanaman buah seperti pepaya. Cara penanaman pun harus dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang hingga saat ini sumberdaya tersebut terbuang begitu saja tanpa pemanfaatan, maka tim pun berusaha mengajak masyarakat membuat Mikro Organisme Lokal (MOL), kompos (pupuk padat), pupuk organik cair, dan pestida nabati dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

IPB juga mendampingi petani dalam pengolahan tanaman obat agar siap konsumsi. Dinas Kesehatan dan masyarakat setempat menyampaikan terima kasih pada IPB yang sudah mendampingi masyarakat dan bekerja seperti keluarga sendiri di Desa Salut. Mereka berharap IPB tidak buru-buru meninggalkan masyarakat sampai mereka benar-benar mampu bergerak secara penuh.

(yon/ris)

Pusat Studi Agraria IPB Angkat Bicara Soal Ketertutupan HGU



Pada tanggal 20 Februari 2019, publik dihadapkan pada persidangan akibat tidak dipenuhinya permohonan informasi oleh badan publik. Kali ini, giliran Greenpeace Indonesia berhadapan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam perkara sengketa informasi dokumen HGU (Hak Guna Usaha) sawit. Perkara ini menambah deretan kasus-kasus ketertutupan ATR/BPN pada kepentingan publik.

Informasi HGU sawit masih dianggap bersifat tertutup atau rahasia oleh Kementerian ATR/BPN. Menciptakan persaingan usaha tidak sehat, membuka rahasia perusahaan merupakan alasan-alasan yang selalu dikemukakan badan publik ini.

“Tidak ada alasan bagi Badan Publik untuk menutup (informasi) HGU. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah menegaskan bahwa HGU sebagai produk dari kebijakan publik merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat. Bahkan beberapa Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung juga sudah menjadi yurisprudensi untuk keterbukaan dokumen HGU sawit,” tutur Linda Rosalina, peneliti Politik dan Kebijakan Agraria pada Pusat Studi Agraria, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB (PSA LPPM IPB).

Senada dengan hal tersebut, Kepala Program Dinamika Ekologi, Kependudukan, dan Agraria PSA LPPM IPB, M. Shohibuddin juga menyayangkan sikap abai Kementerian ATR/BPN. Shohibuddin menyatakan bahwa sikap ini menutup-nutupi dan sekaligus kian mengukuhkan ketimpangan struktural di tanah air yang ironisnya kian menajam justru di era reformasi. Proses demokratisasi pasca otoritarianisme rezim Soeharto justru telah mengantarkan pada penajaman ketimpangan ekonomi. Struktur ketimpangan ekonomi semacam ini senyatanya sejajar dengan struktur ketimpangan penguasaan aset agraria nasional.

Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 2005-2012 pernah menengarai bahwa 56 persen aset nasional yang berupa tanah (kebanyakan dalam bentuk konsesi perkebunan) dikuasai oleh hanya sekitar 0,2 persen populasi Indonesia. Angka ketimpangan agraria ini nyaris identik dengan proporsi penguasaan simpanan uang yang tercatat dalam data LPS (Lembaga Penjamin Nasabah) per Oktober 2017 yaitu: 56,87 persen dari total simpanan uang di lembaga perbankan dikuasai oleh hanya 0,11 persen pemilik rekening di atas Rp 2 miliar. “Kondisi ini menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan pada segelintir elit ekonomi sebagian besar diperoleh dari sektor sumber daya alam melalui penguasaan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang dikandungnya,” tutur Shohibuddin.

PSA-IPB menekankan pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dalam menangani ketimpangan ekonomi dan juga ketimpangan penguasaan aset agraria. Keterbukaan informasi harus dilakukan sebagai pintu masuk bagi efektivitas publik membantu pemerintah mengawasi jalannya pembangunan Sumber-Sumber Agraria (SSA). Urgensi keterbukaan HGU dan informasi penguasaan SSA sepatutnya mampu melampaui kepentingan politik 2019. **(* /ris)**